BAB IV

PENUTUP

IV.1. KESIMPULAN

Berangkat dari paparan temuan data dan pembahasan terkait implementasi Perda No.4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kota Surabaya dalam segi perawatan dan dukungan dapat tarik kesimpulan bahwa implementasi Perda No.4 Tahun 2013 dalam segi perawatan dan dukungan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan Dinas Kesehatan sebagai *leading sector*, telah sesuai dengan harapan dan tujuan dari amanat Perda itu sendiri. Implementasi yang berbentuk program Home Base Care, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Care Giver telah dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya melalui Seksi P2M sesuai dengan amanat Perda dan mengikuti kaidah-kaidah konvensional atau kebijakan formal diatasnya. Implementasi yang berupa program ini pun mendapat dukungan penganggaran APBD secara tepat dan efisien, sehingga dapat menjangkau dan dijangkau oleh pemanfaat yang dalam hal ini adalah ODHA WPS.

Namun dalam pelaksanaannya, program ini juga tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak seperti, LSM peduli HIV, Komisi Penanggulangan HIV AIDS, Dinkes, maupun masyarakat itu sendiri. Kolaborasi yang terjadi diantara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penanggulangan HIV AIDS di Kota Surabaya dalam segi perawatan dan dukungan menjadi kunci keberhasilan implementasi yang berupa perawatan dan

dukungan. Penekanan perawatan dan dukungan menjadi cukup strategis mengingat masih banyaknya bentuk-bentuk pengabaian dan diskriminasi bagi ODHA WPS dalam mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah khususnya pada layanan kesehatan.

IV.2. SARAN

Implementasi yang berupa program dalam segi perawatan dan dukungan ini perlu untuk dikaji kembali untuk selanjutnya dapat ditingkatkan dengan kemampuan untuk menjangkau semua lapisan serta dengan dukungan sarana, sumber daya dan fasilitas yang memadai. Inisiasi untuk mempercepat Raperwali tentang penanggulangan HIV AIDS di Kota Surabaya harus semakin diseriusi dan secara simultan didesakkan untuk segera disahkan. Hal ini dikarenakan, terkait dengan perawatan dan dukungan, di dalam Raperwali tersebut inovasi dan pengembangan segi perawatan dan dukungan ini cukup banyak dan komprehensif.

Alokasi anggaran penanggulangan HIV/AIDS di Kota Surabaya harus didorong untuk ditingkatkan secara signifikan sehingga pemerataan layanan kepada masyarakat baik yang termasuk dalam populasi kunci maupun populasi umum dapat terjangkau. Untuk itu dibutuhkan pendekatan dan kerjasama mutualis antara semua pihak khususnya dalam hal ini antara eksekutif yang merupakan reperesentasi dari pemerintah Kota Surabaya dengan legislatif dalam hal ini adalah DPRD Kota Surabaya.